

Volume 1, Nomor 2, Oktober 2016

ISSN: 0854 - 8242

# **ERA HUKUM**

*Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*

Penyelesaian Sengketa Konsumen  
oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)  
dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa  
di Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK)

*Sugandi Ishak*

Kedudukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran  
Indonesia (MKDKI) dan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)  
dalam Penegakan Disiplin Kedokteran di Indonesia  
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 298K/TUN/2012)

*Andryawan*

Penyelesaian Tindak Pidana Pencucian Uang  
yang Tidak Dibuktikan Terlebih Dahulu Tindak Pidana Asalnya

*Halif*

Itikad Baik sebagai Tolak Ukur Perbuatan Debitur dalam Kepailitan

*Lucky Dafira Nugroho*

Perkembangan Regulasi Perlindungan Konsumen dalam Transaksi  
*E-Commerce* di Indonesia dan Negara-Negara ASEAN

*Deky Paryadi*

Peran Strategis Daerah Atambua (RI) - Bobonalo (Timor Leste) dalam Tata Kelola  
Pertahanan dan Keamanan Nasional Berdasarkan  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

*Yuwono Priyanto & Hery Firmansyah*

Beberapa Catatan Terhadap Tindak Pidana Pasar Modal  
sebagai Bagian dari Tindak Pidana Ekonomi

*Hasbullah F. Sjawie*



### DAFTAR ISI

1. **Sugandi Ishak:** PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DI SEKTOR JASA KEUANGAN (LAPS-SJK) ..... 179
2. **Andryawan:** KEDUDUKAN MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA (MKDKI) DAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA (KKI) DALAM PENEGAKAN DISIPLIN KEDOKTERAN DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR: 298K/TUN/2012) ..... 197
3. **Halif:** PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG TIDAK DIBUKTIKAN TERLEBIH DAHULU TINDAK PIDANA ASALNYA..... 223
4. **Lucky Dafira Nugroho:** ITIKAD BAIK SEBAGAI TOLAK UKUR PERBUATAN DEBITOR DALAM KEPAILITAN..... 241
5. **Deky Paryadi:** PERKEMBANGAN REGULASI PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DI INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA ASEAN ..... 259
6. **Yuwono Prianto dan Hery Firmansyah:** PERAN STRATEGIS DAERAH ATAMBUEA (RI) - BOBONALO (TIMOR LESTE) DALAM TATA KELOLA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA ..... 277
7. **Hasbullah F. Sjawie:** BEBERAPA CATATAN TERHADAP TINDAK PIDANA PASAR MODAL SEBAGAI BAGIAN DARI TINDAK PIDANA EKONOMI ..... 297



# **ERA HUKUM**

## *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*

### **SUSUNAN PENGURUS REDAKSI**

|                        |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penanggung Jawab       | : Dekan FH UNTAR                                                                                                                                                                                                              |
| Ketua Pengarah         | : Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M.                                                                                                                                                                                          |
| Ketua Dewan Penyunting | : Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.                                                                                                                                                                                                  |
| Dewan Penyunting       | : Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.<br>Prof. Dr. H. K. Martono, S.H. LL.M.<br>Prof. Dr. Abdulgani Abdullah, S.H., M.H.<br>Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.<br>Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. |
| Penyunting Pelaksana   | : Mariske Myeke Tampi, S.H., M.H.<br>: Ade Adhari, S.H., M.H.                                                                                                                                                                 |
| Staff Administrasi     | : Esther Emmanuella W                                                                                                                                                                                                         |



*PERAN STRATEGIS DAERAH ATAMBUEA (RI)- BOBONALO (TIMOR LESTE) DALAM TATA KELOLA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA*

**PERAN STRATEGIS DAERAH ATAMBUEA (RI) – BOBONALO (TIMOR LESTE)  
DALAM TATA KELOLA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG  
PERTAHANAN NEGARA**

Oleh

**Yuwono Prianto  
Hery Firmansyah**

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

*Abstract*

*The paradigm of boundary management of Indonesia Timor Leste region in Atambuea Bobonalo has the implementation to the boundary region condition which is relatively isolated and left behind from the economic aspect, defense aspect and national security aspect as well as the legal aspect. It is also required the welfare approach besides the security approach and also the boundary management system which is well and professionally organized. The boundary region needs more attention from the government for that side defense and security is very dependent. Infrastructure in Timor Leste boundary development shall be adequate in the context of defense and security such as the weapon system supply, infrastructure and suprastructure boundary development, recognition/protection of indigenous people rights regulations, the drafting and stipulating the cross-boundary regulations as well as the rule of law supremacy and the improvement of the professionalism of government officials. All in all, we need to maintain the nationalism to the society at the boundary region, and the implementation of policy pattern approach which would not leave the local wisdom behind.*

**A. Latar Belakang Masalah**

Masalah Kedaulatan suatu negara mempunyai banyak dimensi dan aspek yang saling kait-mengait serta mempengaruhi satu sama lain. Ada banyak kepentingan yang bersinggungan dengan masalah kedaulatan, hal itu kerap juga menjadi titik singgung dengan negara lain, khususnya negara tetangga. Keharmonisan hubungan antar negara tetangga kadang terganggu akibat persoalan perbatasan yang tak kunjung disepakati dan kerap menjadi pemicu terjadinya konflik antara satu negara dengan negara lainnya.

Benturan kepentingan antar dua negara yang berbatasan wilayahnya tidak hanya terkait dengan masalah hubungan atau hukum internasional, tetapi juga diwarnai/berakibat pada masalah sosial dan budaya, juga lingkungan, sehingga terlalu naif jika permasalahan perbatasan negara hanya semata-mata dipandang dari sisi pertahanan keamanan.

Perbatasan merupakan aspek yang terpenting dari setiap negara, termasuk Indonesia. Dengan demikian, kedaulatan negara menjadi hak dasar dan hak tertinggi, baik secara alamiah, *de facto*, maupun *de*